



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 11/KEP/KIP/XI/2019

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
b. bahwa sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik diperlukan kualifikasi yang dijadikan tolak ukur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019.


Mengingat : a. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
c. Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 10/KEP/KIP/VIII/2019;

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Informasi Pusat tanggal 8 November 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2019.
- KEDUA : Bahwa Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 berdasarkan kualifikasi per Kategori Badan Publik sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan (Berdasarkan urutan abjad).
- KETIGA : Bahwa hasil keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat dan tidak dapat diganggu gugat
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2019
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT


GEDE NARAYANA

Lampiran I
Keputusan Komisi Informasi Pusat
Nomor : 11 /KEP/ KIP/XI/2019
Tanggal : 13 November 2019

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK TAHUN 2019

KUALIFIKASI INFORMATIF*

Kategori Badan Publik Kementerian

1	Kementerian Dalam Negeri	Informatif
2	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Informatif
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Informatif
4	Kementerian Kesehatan	Informatif
5	Kementerian Keuangan	Informatif
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Informatif
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informatif
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Informatif
9	Kementerian Perhubungan	Informatif
10	Kementerian Pertanian	Informatif
11	Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional	Informatif

Kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

1	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Informatif
2	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Informatif
3	Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batn)	Informatif
4	Bank Indonesia	Informatif

✓

5	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)	Informatif
6	Mahkamah Konstitusi RI	Informatif

Kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural

1	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Informatif
2	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Informatif

Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi

1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Informatif
2	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Informatif
3	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Informatif
4	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Informatif
5	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Informatif
6	Pemerintah Provinsi Riau	Informatif
7	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Informatif
8	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Informatif

Kategori Badan Publik Badan Usaha Milik Negara

1	PT. Taspen (Persero)	Informatif
---	----------------------	------------

Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri

1	Institut Pertanian Bogor	Informatif
2	Institut Teknologi Bandung	Informatif
3	Universitas Brawijaya	Informatif
4	Universitas Gadjah Mada	Informatif
5	Universitas Negeri Padang	Informatif

Kategori Badan Publik Partai Politik

1	Partai Politik PDI Perjuangan	Informatif
---	-------------------------------	------------

*Berdasarkan urutan abjad

g

KUALIFIKASI MENUJU INFORMATIF*

Kategori Badan Publik Kementerian

1	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Menuju Informatif
2	Kementerian Ketenagakerjaan	Menuju Informatif
3	Kementerian Luar Negeri	Menuju Informatif
4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Menuju Informatif
5	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Menuju Informatif
6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Menuju Informatif
7	Kementerian Perdagangan	Menuju Informatif
8	Kementerian Perindustrian	Menuju Informatif
9	Kementerian Sekretariat Negara	Menuju Informatif

Kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

1	Badan Pemeriksa Keuangan RI	Menuju Informatif
2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Menuju Informatif
3	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Menuju Informatif
4	Komisi Yudisial	Menuju Informatif
5	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Menuju Informatif
6	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Menuju Informatif
7	Sekretariat Kabinet	Menuju Informatif

Kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural

1	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura	Menuju Informatif
2	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Menuju Informatif
3	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia	Menuju Informatif

4	Ombudsman Republik Indonesia	Menuju Informatif
5	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Menuju Informatif

Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi

1	Pemerintah Provinsi Aceh	Menuju Informatif
2	Pemerintah Provinsi Bali	Menuju Informatif
3	Pemerintah Provinsi Banten	Menuju Informatif
4	Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	Menuju Informatif
5	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Menuju Informatif
6	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Menuju Informatif
7	Pemerintah Provinsi Papua	Menuju Informatif

Kategori Badan Publik Badan Usaha Milik Negara

1	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Menuju Informatif
---	--------------------------------------	-------------------

Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri

1	ISI Padang Panjang	Menuju Informatif
2	Universitas Indonesia	Menuju Informatif
3	Universitas Negeri Malang	Menuju Informatif
4	Universitas Padjadjaran	Menuju Informatif
5	Universitas Pendidikan Indonesia	Menuju Informatif

Kategori Badan Publik Partai Politik

1	Partai Gerindra	Menuju Informatif
2	Partai Keadilan Sejahtera	Menuju Informatif
3	Partai Kebangkitan Bangsa	Menuju Informatif
4	Partai Persatuan Pembangunan	Menuju Informatif

KUALIFIKASI CUKUP INFORMATIF*

Kategori Badan Publik Kementerian

1	Kementerian Agama	Cukup Informatif
2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Cukup Informatif
3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Cukup Informatif
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Cukup Informatif
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Cukup Informatif
6	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Cukup Informatif
7	Kementerian Pertahanan	Cukup Informatif
8	Kementerian Sosial	Cukup Informatif

Kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

1	Badan Ekonomi Kreatif	Cukup Informatif
2	Badan Informasi Geospasial	Cukup Informatif
3	Badan Kepegawaian Negara	Cukup Informatif
4	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Cukup Informatif
5	Dewan Perwakilan Rakyat RI	Cukup Informatif
6	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Cukup Informatif
7	Lembaga Ketahanan Nasional	Cukup Informatif

Kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural

1	Dewan Ketahanan Nasional	Cukup Informatif
2	Komisi Aparatur Sipil Negara	Cukup Informatif
3	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Cukup Informatif
4	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	Cukup Informatif

5	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Cukup Informatif
---	---------------------------------------	------------------

Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi

1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Cukup Informatif
2	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Cukup Informatif
3	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Cukup Informatif
4	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Cukup Informatif

Kategori Badan Publik Badan Usaha Milik Negara

1	Perum Jasa Tirta II	Cukup Informatif
2	Perum Perhutani	Cukup Informatif
3	PT Angkasa Pura I (Persero)	Cukup Informatif
4	PT Bio Farma (Persero)	Cukup Informatif
5	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Cukup Informatif
6	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Cukup Informatif
7	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Cukup Informatif
8	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Cukup Informatif

Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri

1	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Cukup Informatif
2	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Cukup Informatif
3	Institut Teknologi Sumatera	Cukup Informatif
4	Universitas Airlangga	Cukup Informatif
5	Universitas Andalas	Cukup Informatif
6	Universitas Bengkulu	Cukup Informatif
7	Universitas Jenderal Soedirman	Cukup Informatif
8	Universitas Lambung Mangkurat	Cukup Informatif

9	Universitas Lampung	Cukup Informatif
10	Universitas Negeri Yogyakarta	Cukup Informatif
11	Universitas Negeri Medan	Cukup Informatif
12	Universitas Riau	Cukup Informatif
13	Universitas Sebelas Maret	Cukup Informatif
14	Universitas Sriwijaya	Cukup Informatif
15	Universitas Syiah Kuala	Cukup Informatif
16	Universitas Tanjungpura	Cukup Informatif
17	Universitas Udayana	Cukup Informatif

Kategori Badan Publik Partai Politik

1	Partai Amanat Nasional	Cukup Informatif
2	Partai Demokrat	Cukup Informatif
3	Partai Golkar	Cukup Informatif
4	Partai Nasdem	Cukup Informatif

*Berdasarkan urutan abjad

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT



GEDE NARAYANA